

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Undang-Undang No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan menegaskan bahwa kelembagaan penyuluhan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a yaitu: a. pada tingkat pusat berbentuk badan yang menangani penyuluhan; b. pada tingkat provinsi berbentuk Badan Koordinasi Penyuluhan; c. pada tingkat kabupaten/kota berbentuk badan pelaksana penyuluhan; dan d. pada tingkat kecamatan berbentuk Balai Penyuluhan. Dalam hal ini Balai Penyuluhan Pertanian yang dimaksud mempunyai peran yang sangat penting dalam kemajuan suatu kelembagaan petani yang menjadi dasar keberhasilan sistem penyuluhan pertanian. Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Balai Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf d mempunyai tugas: a. menyusun program penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan kabupaten/kota; b. melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan; c. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar; d. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha; e. memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya, dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan; dan f. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha. Pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian dilakukan paling kurang melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan penyuluhan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pembiayaan, pembinaan, serta pengawasan pengawasan.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini mempunyai dampak terhadap kemajuan Balai Penyuluhan Pertanian dalam mendiseminasikan informasi pertanian. Pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pembangunan pertanian memerlukan kompetensi dari pengguna teknologi informasi dan

komunikasi tersebut. Petani merupakan salah satu pihak yang masih sangat lemah dalam mengadopsi sumber informasi pertanian.

Beberapa informasi yang dibutuhkan petani dan penting bagi pertumbuhan dan perkembangan pertanian, antara lain informasi pasar, teknologi terbaru, program pembangunan pedesaan dan subsidi, harga input dan ketersediaan serta pengolahan pasca panen, sehingga ini menjadi hal yang dapat melatarbelakangi untuk dilakukan penguatan kapasitas Balai Penyuluhan Pertanian sebagai pusat data informasi pertanian dan pusat pembelajaran untuk penyuluh dan petani.

Selanjutnya untuk melakukan penguatan kapasitas Balai Penyuluhan Pertanian, Menteri Pertanian telah mencanangkan program baru yang terdapat dalam Permentan No. 49 Tahun 2019 Tentang Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Kostratani). Pada pasal 1 ayat (1) dan (2) dalam peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Komando Strategis pembangunan pertanian yang selanjutnya disebut Kostratan adalah Gerakan pembaharuan pembangunan pertanian nasional berbasis Teknologi Informasi. 2. Komando strategis petani yang selanjutnya disebut Kostratani adalah gerakan pembaharuan pembangunan pertanian kecamatan, melalui optimalisasi tugas, fungsi dan peran Balai Penyuluhan Pertanian dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan pertanian. Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Kostratani) mendorong fungsi dan peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai pusat data informasi, pusat pembelajaran untuk penyuluh dan petani, pusat gerakan pembangunan pertanian, pusat konsultasi agribisnis, dan pusat pengembangan jejaring kemitraan.

Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang memiliki potensi yang cukup besar dan dapat dikembangkan terutama dalam bidang pertanian. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Namo Rambe sebagai kelembagaan penyuluhan pertanian bertugas melaksanakan penyuluhan, menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi. Dalam hal ini perlu dilakukan penguatan fungsi dan kapasitas untuk penguasaan teknologi dan mendukung peningkatan produktivitas pertanian dengan beberapa strategi yaitu sarana dan prasarana BPP akan diperkuat mulai dari perbaikan kantor BPP, kendaraan operasional penyuluh, dan perangkat teknologi informasi. Diperkuat pula kapasitas dan kompetensi penyuluh pertanian melalui pelatihan tematik, kelembagaan Posluhdes dan

penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Pemantauan dan koordinasi lapangan didukung *Agriculture War Room* (AWR), pencitraan satelit, CCTV Solar Panel, Drone dan dukungan teknologi informasi lainnya sehingga seluruh aktivitas di lapangan hingga tingkat kecamatan dan desa dapat dipantau *realtime*.

Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Namo Rambe memiliki beberapa permasalahan terkait belum terpenuhinya kriteria sebagai BPP yang telah menjalankan tugas dan fungsi serta penguatan kapasitas antara lain adalah akses jalan yang kurang baik, sarana dan prasarana yang belum lengkap dan kuantitas serta kompetensi penyuluh yang perlu ditingkatkan sehingga informasi pertanian dalam hal pertumbuhan dan perkembangan pertanian, antara lain informasi pasar, teknologi terbaru, program pembangunan pedesaan dan subsidi, harga input dan ketersediaan serta pengolahan pasca panen belum dapat disebarluaskan dan diterapkan secara maksimal. Selain itu hal penting yang harus terpenuhi dalam Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) kecamatan Namo Rambe dalam persiapan untuk mendukung program Kostratani yaitu ketersediaan luas lahan pertanian, jaringan internet, ruangan pertemuan yang memadai, dan keamanan yang terjamin serta data dan informasi BPP baik yang ditempel maupun yang di aplikasi Simluhtan dan *Cyber Extension* harus segera diperbarui.

Dilihat dari sisi sumber daya manusia (SDM), BPP harus memiliki petugas IT, admin, calon komandan Kostratani dan penyuluh. Setiap BPP, idealnya memiliki 8 orang penyuluh, penyuluh milenial pun diharapkan ada dalam BPP kecamatan Namo Rambe, sebab regenerasi petani milenial juga menjadi tujuan dari pembangunan pertanian di masa depan. Karakter penyuluh milenial yang inovatif, berinteraksi dengan media sosial, fleksibel, punya rasa ingin tahu yang tinggi, dan peka terhadap perubahan harus melekat pada Kostratani. Penyuluh milenial juga harus *meng-update* teknologi informasi serta menguasai dan mampu mengoperasikan seluruh perangkat sistem yang dipersiapkan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Dalam melakukan penyuluhan, selain *face to face* dapat juga melalui *teleconference*, melalui media sosial, aplikasi *messenger* sehingga tidak memiliki ruang batas waktu antara petani dan penyuluh. Untuk itu program Kostratani dalam rangka penguatan fungsi dan kapasitas tingkat kecamatan bertujuan agar Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Namo Rambe

menjadi kelembagaan pertanian yang dapat menjadi pusat data informasi pertanian yang dibutuhkan petani.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dibuat rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan untuk mempermudah fokus masalah yang akan dikaji, yaitu sebagai berikut:

1. Seberapa besar peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai pusat data informasi pertanian dalam mendukung program Kostratani di Kecamatan Namo Rambe?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai pusat data informasi pertanian dalam mendukung program Kostratani di Kecamatan Namo Rambe?

### **C. Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari pelaksanaan pengkajian mengenai peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai pusat data informasi pertanian dalam Mendukung Program Kostratani di Kecamatan Namo Rambe adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis tingkat peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai pusat data informasi pertanian dalam mendukung program Kostratani di Kecamatan Namo Rambe.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai pusat data informasi pertanian dalam mendukung program Kostratani di Kecamatan Namo Rambe.

### **D. Kegunaan**

Kegunaan dari kegiatan pengkajian ini adalah sebagai berikut:

1. Sarana bagi mahasiswa untuk mempraktikkan secara komprehensif semua ilmu yang dipelajari .
2. Bahan pertimbangan bagi pihak yang berwenang untuk mengambil kebijakan dalam memperkuat fungsi dan kapasitas Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai pusat data informasi pertanian dalam mendukung program Kostratani.

3. Memberikan informasi bagi petani tentang pentingnya fungsi dan kapasitas Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai pusat data informasi pertanian dalam mendukung program Kostratani.

#### **E. Hipotesis**

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah disampaikan serta didukung dengan beberapa informasi, maka dapat dibangun suatu hipotesis sebagai bentuk kesimpulan sementara untuk menjawab rumusan permasalahan yang ada. Adapun hipotesis dari pengkajian ini adalah:

1. Diduga peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai pusat data informasi pertanian dalam mendukung program Kostratani di Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang masih rendah.
2. Diduga ada faktor-faktor yang mempengaruhi peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai pusat data informasi pertanian dalam mendukung program Kostratani di Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang.